

# JURNAL

# KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI

# KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 14	No. 1	Hal. 1 - 91	Jakarta Juni 2024	ISSN 2089-6980
--------------------------------	---------	-------	-------------	----------------------	-------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **200/M/KPT/2020**

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi  
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi  
Kelautan dan Perikanan

# JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

---

---

**Volume 14 Nomor 1, Desember 2024**

**Penanggung Jawab :**

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

**Dewan Redaksi :**

***Ketua:***

Dr. Irwan Muliawan (*Ekonomi Sumber Daya*)

***Anggota:***

Prof. Dr. Harsuko Riniwati (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Prof. Dr. Ir. Ketut Sukiyono., DipAgEc. MEc, (*Ekonomi Pertanian*)

Dr. Armen Zulham (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan*)

Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. (*Sistem Usaha Perikanan*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Nendah Kurniasari, M. Si (*Sosiologi & Kelembagaan*)

**Redaksi Pelaksana :**

Sinta Nurwijayanti, M.A.

Rizki Aprilian Wijaya, M.T.

Dr. Subhechanis Saptanto

Freshy Yulia Arthatiani, M.Si

Badzlina Balqis, S.TP

Rahadi Susetyo Friendly Muhammad, S.I.Kom.

**Desain dan Tata Letak :**

Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

**Alamat Redaksi :**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung BRSDM KP 2 Lt. 2

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: kebijakan.osek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Analisis Kebijakan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Seribu; (ii) Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia; (iii) Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Pesisir Pantai Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul; (iv) Strategi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Sungai Sengkarang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah; (V) Strategi Mitigasi Risiko Pemanfaatan Rumpon Dalam Mendukung Kebijakan Penataan Ruang Laut Berkelanjutan (Studi Kasus: Penangkapan Tuna di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur); (vi) Aset Mata Pencarian dan Efisiensi Model Rantai Pasok-Rantai Nilai Perikanan Tangkap Pelagis Kecil Masyarakat Pesisir Pulau Saparua, dan; (vii) Analisis Budi Daya Lobster Berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

**Redaksi**

## UCAPAN TERIMA KASIH

---

---

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 14 Nomor 1, Juni 2024 adalah:

1. Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc. Ph.D (*Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Diponegoro*)
2. Achmad Zamroni, Ph.D (*Pengelolaan Wilayah Pesisir - Badan Riset Inovasi Nasional*)
3. Dr. Ir. Edi Susilo, MS (*Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya*)
4. Maulana Firdaus, Ph.D (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
5. Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D. (*Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan - Universitas Negeri Makassar*)
6. Maharani Yulisti, Ph.D (*Sistem Usaha Pemasaran dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
7. Dr. Budi Wardono (*Sistem Usaha Pemasaran dan Perikanan- Badan Riset Inovasi Nasional*)
8. Dr. Najamuddin, ST, M.Si (*Ilmu Kelautan dan Lingkungan - Universitas Khairun*)
9. Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si (*Ekonomi Sumber daya - IPB University*)
10. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH (*Dinamika Pengelolaan Sumberdaya - Universitas Syiah Kuala*)
11. Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M (*Hukum & Kelembagaan- Badan Riset Inovasi Nasional*)
12. Riesti Triyanti, M. Ling (*Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)
13. Andi Alamsyah Rivai, S.Pi., M.Si (*Dinamika Pengelolaan Sumberdaya - Universitas Negeri Makassar*)
14. Tenny Apriliani, M.Si. (*Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)

**JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Volume 14 Nomor 1, Tahun 2024**

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
UCAPAN TERIMA KASIH .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Analisis Kebijakan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Seribu <i>Oleh : Adi Muliadi, Soeryo Adiwibowo, Yonvitner, Donwill Panggabean, Eha Saleha, Rinda Noviyanti dan Jan Hotman .....</i>	1 - 13
Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia <i>Oleh : Muhammad Rafi Darajati .....</i>	15 - 22
Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Pesisir Pantai Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul <i>Oleh : Alifa Putri Madina, Darsono dan Ernoiz Antriyandarti .....</i>	23 - 36
Strategi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Sungai Sengkarang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah <i>Oleh : Heri Ariadi, Ashari Fabrurrozi, Wijianto dan M. Babrus Syakirin .....</i>	37 - 45
Strategi Mitigasi Risiko Pemanfaatan Rumpon Dalam Mendukung Kebijakan Penataan Ruang Laut Berkelanjutan (Studi Kasus: Penangkapan Tuna di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur) <i>Oleh : Riesti Triyanti, Yesi Dewita Sari, Cornelia Mirwantini Witomo, Hakim Miftakhul Huda dan Hertria Maharani Putri .....</i>	47- 64
Aset Mata Pencaharian dan Efisiensi Model Rantai Pasok-Rantai Nilai Perikanan Tangkap Pelagis Kecil Masyarakat Pesisir Pulau Saparua <i>Oleh : Hermi Oppier, Fabruddin Ramly, Arsad Matdoan dan Hendri D. Habury .....</i>	65 - 79
Analisis Budi Daya Lobster Berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat <i>Oleh : Abdari Rohmanurcaesari, Eva Anggraini dan Nurliab Buhari .....</i>	81 - 91

Analisis Kebijakan Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Seribu

*Resolving Fishermen Conflict through the Development of Co-settlement (Case Study in Cilacap City)*

Adi Muliadi, Soeryo Adiwibowo, Yonvitner, Donwill Panggabean, Eha Saleha,  
Rinda Noviyanti dan Jan Hotman

**ABSTRAK**

Zona inti Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dapat menghadapi ancaman antropogenik alami maupun karena dampak kebijakan dan ego sektoral. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji aspek ekologi, sosial, dan ekonomi di kawasan konservasi Kepulauan Seribu sehingga dapat menghasilkan skenario terbaik setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang perubahan zona inti KKP3K. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara serta data sekunder dari studi dokumentasi dengan skenario menggunakan analisis *trade-off*. Hasil penelitian menunjukkan skenario terbaik (rata-rata 57) adalah skenario B (zona inti digunakan untuk ekowisata berkelanjutan) karena mengedepankan asas keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu aset dalam mendorong pariwisata. Skenario A (zona inti tidak perlu dirubah) menjadi alternatif kedua karena pembatasan aktifitas melalui sistem zonasi positif terhadap keberlanjutan ekologi lingkungan, sedangkan skenario C (zona inti digunakan untuk ekonomi) menggambarkan perubahan aspek ekologi, ekonomi dan sosial yang berdampak negatif terhadap ekologi dan hanya berimplikasi positif terhadap aspek ekonomi dan sosial. Dasar legalitas dari perubahan zona inti yang digunakan untuk proyek strategis nasional akan menimbulkan dampak sosial dan ekologi, oleh karena itu perubahan terhadap zona inti mestinya tidak perlu dilakukan kecuali dapat memberikan alternatif yang bermuara pada penyesuaian dan peningkatan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial pada kawasan tersebut.

**Kata Kunci:** kawasan konservasi; zona inti; pesisir; analisis *trade-off*

**ABSTRACT**

The core zone of the Coastal Marine Protected Area and Small Islands (KKP3K) can face anthropogenic, natural threats, as well as due to the impact of sectoral policies and egos. The purpose of this study is to examine the ecological, social, and economic aspects of the Thousand Islands conservation area so that it is expected to produce the best scenario related to the issuance of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning changes in the KKP3K core zone. This research uses quantitative methods with an empirical approach and uses primary data obtained through Focus Group Discussion (FGD) and interviews as well as secondary data from documentation studies screened with scenarios using trade-off analysis. The results showed that the best scenario (average 57) was scenario B (core zone used for sustainable ecotourism) because it prioritized the principle of environmental sustainability as one of the assets in encouraging tourism. Scenario A (core zone does not need to be changed) is the second alternative because restrictions on activities through the zoning system positively on the sustainability of environmental ecology, while scenario C (core zone is used for economics) describes changes in ecological, economic and social aspects that can produce negative impacts on ecology and only have positive implications for economic and social aspects. The legality basis of changes to core zones used for national strategic projects will have social and ecological impacts, therefore changes to core zones should not be necessary unless they provide alternatives that lead to alignment and improvement of ecological, economic, and social aspects of the region.

**Keywords:** conservation areas; core zones; coast; trade-off analysis

Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia

*The Urgency of Implementing the Blue Economy Concept in Indonesian Marine Governance*

Muhammad Rafi Darajati

**ABSTRAK**

Sebagai sebuah negara kepulauan, maka pembangunan bidang kelautan harus dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan alasan urgensi penerapan prinsip ekonomi biru dalam pengaturan tata kelola kelautan Indonesia. Hal ini menjadi penting dikarenakan kebijakan Pemerintah hendaknya selalu berorientasi kepada pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengelolaan kelautan yang berbasis ekonomi biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kelautan yang berbasis ekonomi biru dapat menjadi andalan dalam peningkatan pendapatan Indonesia di masa yang akan depan sehingga dapat mewujudkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk menata ulang tata kelola kelautan nasional yang selaras dengan alam. Temuan dari hasil penelitian ini berupa strategi langkah kebijakan yang dapat dijalankan, yaitu dengan cara menselaraskan dan menguthukan tatanan hukum laut; menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan; menguthukan dan mengintegrasikan data dan informasi laut; dan menumbuh kembangkan riset dan teknologi kelautan.

**Kata Kunci:** ekonomi biru; hukum laut; pembangunan berkelanjutan; Poros Maritim Dunia; negara kepulauan

**ABSTRACT**

*As an archipelagic state, the development of the marine sector must be prioritized in its development policies in Indonesia. This study aims to elucidate the reasons for the urgency of implementing blue economy principles in the governance of Indonesia's marine sector. This reason is crucial as government policies should always be oriented towards sustainable marine development. This article employs qualitative research methods to assess the extent of stakeholders' efforts in marine management based on the blue economy. The study findings demonstrate that a blue economy-based marine economy can serve as a cornerstone for increasing Indonesia's future income, thus realizing its vision as the Global Maritime Fulcrum. Therefore, the Indonesian government has the opportunity and responsibility to restructure national marine governance in harmony with nature. The research findings present a strategy of policy steps that can be implemented, including harmonizing and strengthening the legal framework for the seas, strengthening and synergizing marine institutions and cooperation, strengthening and integrating marine data and information, and promoting marine research and technology.*

**Keywords:** blue economy; the law of the sea; sustainable development; Global Maritime Fulcrum; archipelagic state

Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Pesisir Pantai Sadeng, Kecamatan Girisubo,  
Kabupaten Gunungkidul

*Business Development Strategy of Capture Fishery in Sadeng Coast, Girisubo Subdistrict, Gunungkidul District*

Alifa Putri Madina, Darsono dan Ernoiz Antriyandarti

**ABSTRAK**

Wilayah Pesisir Pantai Sadeng memiliki potensi perikanan tangkap yang besar, didukung dengan adanya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. Akan tetapi di sisi lain, usaha perikanan tangkap menghadapi berbagai permasalahan seperti teknologi penangkapan skala kecil, SDM dan kelembagaan yang lemah, serta ketergantungan permodalan. Optimalisasi usaha perikanan tangkap perlu dilakukan dengan strategi pengembangan yang tepat. Penelitian ini bertujuan merumuskan prioritas strategi pengembangan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha perikanan tangkap di perairan Sadeng. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur dengan 25 key informan yang terdiri dari beberapa stakeholder seperti nelayan, petugas pelabuhan, penyuluh, dan dinas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan matriks IFE, matriks EFE, matriks IE, matriks SWOT dan QSPM. Posisi usaha perikanan tangkap nelayan Sadeng berada pada sel II matriks IE yang berarti memerlukan strategi pertumbuhan. Hasil prioritas strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir Pantai Sadeng, Girisubo, Gunungkidul adalah strategi penyediaan sarana produktif di kawasan pelabuhan. Keterjangkauan sumber produktif dalam pengembangan sektor perikanan dapat mewujudkan kegiatan usaha penangkapan ikan yang lebih efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

**Kata Kunci:** perikanan tangkap; Sadeng; strategi; SWOT; QSPM

**ABSTRACT**

The coastal area of Sadeng Beach has high capture fisheries potential, supported by the existence of the PPP Sadeng. On the other hand, the capture fisheries business faces various problems such as small-scale fishing technology, weak human resources and institutions, and capital dependence. Optimization of the capture fisheries business needs to be done with the right development strategy. This study aims to formulate priority development strategies by taking into account the strengths, weaknesses, opportunities and threats of capture fisheries in Sadeng waters. This research used descriptive qualitative method. The study was based on empirical analysis including questionnaire and interview surveying of 25 key informants consisting of several stakeholders such as fishermen, port officers, extension workers and government. Data analysis was performed using the IFE matrix, EFE matrix, IE matrix, SWOT matrix and QSPM. The position of the Sadeng fishermen's capture fisheries business is in cell II of the IE matrix, which means it requires a growth strategy. The priority result of the capture fisheries business development strategy on the coast of Sadeng Beach, Girisubo, Gunungkidul is the strategy of providing productive facilities in the port area. Affordability of productive sources can create more efficient fishing business activities to improve the welfare of coastal communities.

**Keywords:** capture fishery; Sadeng; strategy; SWOT; QSPM



Strategi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Sungai Sengkarang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

*Sustainable Strategy for Management of Fish Resources in Sengkarang River, Pekalongan Regency, Central Java*

Heri Ariadi, Ashari Fahrurrozi, Wijianto dan M. Bahrus Syakirin

**ABSTRAK**

Sungai Sengkarang merupakan kawasan ekosistem hayati terpadu yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan status sumber daya ikan di Daerah Aliran Sungai Pekalongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik ekosistem Sungai Sengkarang, menganalisis permasalahan pemanfaatan, dan menganalisis strategi pengelolaan Sungai Sengkarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data secara terstruktur untuk menjawab tujuan penelitian. Berdasarkan kondisi ekologi, Sungai Sengkarang masih memiliki kondisi perairan yang cukup baik untuk dapat digunakan sebagai habitat ikan liar. Meskipun ekosistem perairan Sungai Sengkarang memiliki nilai biodiversitas yang beragam, tetapi kegiatan eksploitasi dari aktifitas manusia dirasakan dapat mengancam kelestarian sumber daya alam disana. Adapun permasalahan yang ada di sepanjang DAS Sungai Sengkarang diantaranya adalah terjadinya pencemaran lingkungan perairan, penutupan kanal air sungai, penangkapan liar, penurunan muka tanah, dan perhatian masyarakat sekitar yang minim. Selain itu, keberadaan populasi ikan di Sungai Sengkarang juga mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir akibat adanya eksploitasi penangkapan sumber daya ikan dan pencemaran perairan akibat kontaminasi limbah batik dan tekstil. Untuk menjaga supaya ekosistem hayati dan sumber daya ikan di perairan Sungai Sengkarang dapat pulih kembali maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) pengembangan suaka perairan; 2) rehabilitasi sungai; 3) restocking ikan; dan 4) pengembangan sistem *co-management* dan beberapa strategi lain yang relevan secara terintegrasi.

**Kata Kunci:** pencemaran; ikan, biodiversitas; ekosistem; habitat

**ABSTRACT**

The Sengkarang River is the longest river in Pekalongan waters. Aside from being a natural fish habitat, the Sengkarang River is also used as a buffer for biological ecosystems in the waters of Pekalongan City and Regency. The purpose of this study was to determine the fish resources status in the Sengkarang River and efforts to manage them. The method used in this research is descriptive qualitative with structured data collection to answer the research objectives. Based on the water quality conditions, the Sengkarang River water description still has good enough conditions to be used as wild fish habitat. Even though the waters of the Sengkarang River have diverse biodiversity values, exploitation from human activities is felt to threaten the preservation of natural resources there. The problems that exist along the Sengkarang River watershed include pollution of the aquatic environment, closure of river water canals, illegal fishing, land subsidence, and minimal attention from the local community. Apart from that, the existence of fish populations in the Sengkarang River has also begun to decline in recent years due to exploitation of fish resources and water pollution due to contamination of batik and textile waste. In order to keep the biological ecosystem and fish resources in the waters of the Sengkarang River recovering, the following efforts are needed: 1.) development of water reserves, 2.) river rehabilitation, 3.) fish restocking, and 4.) development of a *co-management* system and strategic related option is an integrated manner.

**Keywords:** pollution; fish; biodiversity; ecosystem; habitat

**Strategi Mitigasi Risiko Pemanfaatan Rumpon Dalam Mendukung Kebijakan Penataan Ruang Laut Berkelanjutan  
(Studi Kasus: Penangkapan Tuna di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)**

*Risk Mitigation Strategies of The Utilization of Fish Aggregating Devices (FADs) to Support Sustainable Marine Spatial  
Layout Policy (Case study: Tuna Fishing Business in Pacitan Regency, East Java)*

**Riesti Triyanti, Yesi Dewita Sari, Cornelia Mirwantini Witomo,  
Hakim Miftakhul Huda dan Hertria Maharani Putri**

**ABSTRAK**

Demi keserasian ruang laut, pemerintah saat ini telah mengeluarkan kebijakan pengeloaan ruang laut dan perizinan untuk alat tangkap rumpon. Namun perlu dipahami terlebih dahulu beberapa risiko penggunaan rumpon dalam penangkapan ikan. Risiko yang ada disebabkan karena faktor eksternal (faktor alam), maupun yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal (sumber daya manusia, kelembagaan, kebijakan dan teknologi) sehingga menimbulkan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Faktor ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi level risiko penggunaan rumpon terhadap kelestarian sumberdaya, lingkungan perairan, dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan tuna. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi karakteristik usaha penangkapan ikan tuna dengan alat tangkap rumpon, (2) Memetakan dan menganalisis risiko penggunaan rumpon dalam usaha penangkapan ikan tuna, dan (3) Merumuskan strategi pengurangan risiko penggunaan rumpon dalam usaha penangkapan ikan tuna sehingga dapat digunakan sebagai basis awal pengaturan ruang laut terkait alat tangkap rumpon. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada bulan Juli–Desember 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui statistik perikanan dan tinjauan pustaka. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan House of Risk. Hasil penelitian menunjukkan pemetaan risiko penggunaan rumpon dalam penangkapan ikan dapat ditinjau dari lima aspek yaitu abiotik, biotik, kelembagaan, pemangku kepentingan, dan bisnis penangkapan. Terdapat 19 kejadian risiko dan 18 agen risiko penggunaan rumpon oleh nelayan, serta 7 sumber risiko kritis berdasarkan nilai potensi risiko agregat terbesar. Pemerintah harus melakukan penataan ulang rumpon dengan memperhatikan kondisi karakteristik gelombang, pengawasan berupa pengawasan bersama dengan masyarakat maupun pemasangan alat GPS dan insentif kebijakan seperti akses terhadap keuangan formal. Penataan ulang rumpon sesuai penilaian risiko diharapkan akan meningkatkan produksi ikan dan keberlanjutan sumber daya ikan akan dapat dikendalikan dengan baik.

**Kata Kunci:** mitigasi risiko; rumpon; *house of risk*; perikanan tangkap; tuna; berkelanjutan

**ABSTRACT**

The government has now issued a marine space management policy and permits for FAD fishing gear for harmony in marine space. However, it is necessary first to understand some of the risks of using FAD fishing gear in fishing. Existing risks are caused by external factors, such as natural factors, and those influenced by various internal factors, such as human resources, institutions, policies, and technology, giving rise to high uncertainty. These uncertainty factors can affect the level of risk of using FADs for resource sustainability, the aquatic environment, and the sustainability of tuna fishing businesses. For this reason, this research aims to: identify the characteristics of tuna fishing businesses using FAD fishing gear, map and analyze the risks of using FADs in tuna fishing businesses, and formulate strategies to reduce the risk of using FADs in fishing businesses. Therefore, catching tuna using FADs can be an initial basis for regulating marine space regarding FAD fishing equipment. The research was conducted in Pacitan Regency, East Java, in July–December 2021. The data used in this research were primary data obtained through interviews and secondary data obtained through fisheries statistics and literature reviews. Data analysis uses descriptive analysis and the House of Risk. The research results show that risk mapping for using FADs in fishing can be viewed from five aspects: abiotic, biotic, institutional, stakeholder, and fishing business. There are 19 risk events and 18 risk agents for the use of FADs by fishermen, as well as seven critical risk sources based on the most significant aggregate potential risk value. The government must reorganize FADs by paying attention to wave characteristics, joint monitoring with the community, and installing GPS equipment and policy incentives such as access to formal finance. The rearrangement of FADs according to the risk assessment will increase fish production, and the sustainability of fish resources will be well controlled.

**Keywords:** risk mitigation; fish aggregating devices; house of risk; capture fisheries; tuna; sustainability

Aset Mata Pencapaian dan Efisiensi Model Rantai Pasok-Rantai Nilai Perikanan Tangkap Pelagis Kecil  
Masyarakat Pesisir Pulau Saparua

*Livelihoods Assets and The Efficiency of Supply Chain-Value Chain Model of Small Pelagic Capture Fisheries of Coastal  
Communities of Saparua Island*

Hermi Oppier, Fahrudin Ramly, Arsad Matdoan dan Hendri D. Hahury

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aset mata pencapaian dan efisiensi model rantai pasok dan rantai nilai perikanan tangkap pelagis kecil masyarakat pesisir Pulau Saparua. Penelitian ini memadukan metode kuantitatif dengan desain survei. Data primer dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dan focus group Discussion (FGD), sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, jurnal, dan laporan. Data dianalisis menggunakan analisis aset penghidupan dan analisis kinerja rantai pasok. Hasilnya menunjukkan bahwa, masyarakat pesisir Pulau Saparua memiliki keberagaman aset matapencapaian, antara lain aset alam, aset manusia, aset fisik, aset sosial dan aset keuangan. Namun, diantara kelima aset matapencapaian tersebut yang memiliki kontribusi besar terhadap matapencapaiannya adalah aset alam dan aset sosial. Sementara, efisiensi model rantai pasok-rantai nilai menunjukkan bahwa, semakin pendek rantai pemasaran maka biaya pemasaran atau produksi, margin pemasaran, harga yang dibayar konsumen akan semakin rendah, namun harga yang diterima produsen akan semakin tinggi. Kegiatan pemasaran dapat dikatakan berhasil jika didukung oleh daya beli konsumen yang tinggi dan distribusi yang baik. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat dua rantai pemasaran pendek yang efisien dengan hanya dua pelaku (nelayan – pedagang pengumpul dan nelayan – pengecer/perempuan papalele). Namun kedua rantai pemasaran tersebut harus diperlakukan secara berbeda, dimana rantai pemasaran pertama memiliki nilai efektivitas yang lebih rendah dibandingkan rantai pemasaran berikutnya..

**Kata Kunci:** aset mata pencapaian; rantai pasok; rantai nilai; perikanan tangkap pelagis kecil; masyarakat pesisir

**ABSTRACT**

*This study aims to investigate livelihoods assets and the effectiveness of supply chain and value chain model of small pelagic capture fisheries of coastal communities of Saparua Island. This study combined a quantitative method using a survey design. The primary data was collected from field research using in-depth interviews and focus group discussions (FGDs), while the secondary data was collected from related agencies, journals, and reports. The data was analyzed using livelihood asset analysis and supply chain performance analysis. The results show that the coastal communities of Saparua Island have a diversity of livelihood assets, including natural assets, human assets, physical assets, social assets and financial assets. However, among the five livelihood assets that have a major contribution to livelihoods are natural assets and social assets. Meanwhile, the effectiveness of the supply chain-value chain model shows that the lower the marketing or production costs, marketing margin, consumer prices paid, but the producer prices received would be higher. The marketing activities could be considered successful if they were supported by a high customer purchasing power and proper distribution. This study concludes that there were two effective short marketing chains with only two actors (fishermen – collecting traders and fishermen – retailers / papalele women). The two marketing chains, however, must be treated differently, with the former having a lower effectiveness value than the later.*

**Keywords:** livelihoods assets; supply chain; value chain; small pelagic capture fisheries; coastal communities

Analisis Budi Daya Lobster Berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat

*Sustainable Management of Lobster Farming in Lombok, West Nusa Tenggara*

Abdari Rohmanurcaesari, Eva Anggraini dan Nurliah Buhari

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kelayakan usaha dan merumuskan pengelolaan usaha budi daya lobster yang berkelanjutan di Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan melihat dari dimensi ekologi, ekonomi, kelembagaan, sosial dan teknologi. Kelayakan dihitung dengan analisis biaya manfaat dan keberlanjutan usaha dilihat dengan analisis RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*). Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Jerowaru. Penentuan responden dilakukan menggunakan purposive sampling. Jumlah responden ditentukan dengan rumus Slovin didapat hasil 92 pembudidaya, akan tetapi untuk mengantisipasi outlier data maka diambil 99 pembudidaya. Berdasarkan data yang telah diolah memiliki hasil bahwa pada kapasitas usaha 8 lubang, 12 lubang dan 16 lubang layak, sedangkan pada kapasitas usaha 4 lubang tidak layak. Hasil indeks keberlanjutan menunjukkan bahwa dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial adalah cukup berkelanjutan, dimensi teknologi adalah kurang berkelanjutan, dan dimensi kelembagaan adalah tidak berkelanjutan...

**Kata Kunci:** akuakultur; budi daya lobster; kelayakan usaha; keberlanjutan usaha; Pulau Lombok

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to look at business feasibility and formulate sustainable management of lobster farming in Lombok, West Nusa Tenggara by looking at the ecological, economic, institutional, social and technological dimensions. Feasibility is calculated by benefit cost analysis and business sustainability is seen by RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries) analysis. The research location was in Jerowaru sub-district. Determination of respondents was done using purposive sampling. The number of respondents was determined by the Slovin formula, resulting in 92 cultivators, but to anticipate data outliers, 99 cultivators were taken. Based on the data that has been processed, the results show that the business capacity of 8 holes, 12 holes and 16 holes is feasible, while the business capacity of 4 holes is not feasible. The results of the sustainability index show that the ecological dimension, economic dimension, and social dimension are quite sustainable, the technological dimension is less sustainable, and the institutional dimension is unsustainable.*

**Keywords:** aquaculture; lobster farming; business feasibility; business sustainability; Lombok Island



**BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Gedung BRSDM 2 KP Lt. 2  
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara  
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924  
Web : <https://kkp.go.id/brsdm/sosek>  
email : [kebijakan.asek@gmail.com](mailto:kebijakan.asek@gmail.com)

ISSN **2089-6980**



9 772089 698058